Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Kepolisian dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Fadhlorrohan Darwis¹, Sufirman Rahman², Azwad Rachmat Hambali³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Fadhlorrd021@gmail.com

Abstract:

This research is to find out the application of the principle of presumption of innocence in the investigation process at the Makassar City Resort Police. And to find out the factors that hinder the application of the principle of presumption of innocence in the investigation process at the Makassar City Resort Police. This research uses a type of empirical research, which is an approach that refers to written regulations or other legal materials that are secondary, to see how it is applied/implemented through a field study conducted with sociological and interviews, so that clarity can be obtained about the matter being researched. The results of this study show that the application of the principle of presumption of innocence in the investigation process by the Makassar City Resort Police (Polrestabes) is still not carried out optimally There are still many violations of the application of this principle such as in the form of repressive actions against suspects, as well as the practice of intimidation and physical and psychological violence experienced by several suspects in the examination process. And the factors that hinder the application of the principle of presumption of innocence in the investigation process in the Makassar City Resort Police are, internally, such as the lack of understanding of the authorities, external such as the lack of understanding of the community's law.

Keywords: *Principle of presumption of innocence, police, theft, enforcement Law.*

Abstrak:

Penelitian ini Untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara, sehingga dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang di teliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar masih belum terlaksana secara optimal Masih banyak pelanggaran terhadap penerapan asas ini seperti, berupa tindakan represif terhadap tersangka, serta praktik intimidasi dan kekerasan fisik maupun psikis yang dialami oleh beberapa tersangka dalam proses pemeriksaan. Serta Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Pada Kepolisian Resort

Kota Kota Besar Makassar adalah, internal seperti minimnya pemahaman aparat, eksternal seperti kurangnya pemahaman hukum masyarakat

Kata kunci: *Asas praduga tak bersalah, kepolisian, tindak pidana pencurian, penegakan Hukum.*

PENDAHULUAN

Pengaturan dan penegakan hak asasi manusia adalah suatu esensial pada suatu negara hukum, khususnya di Indonesia. Lebih lanjut, dalam mengupayakan akan pentingnya suatu hukum di lingkungan masyarakat untuk setiap individu dapat mengerti dan menghargai hak serta kewajibannya. Upaya ini juga akan berkontribusi pada pembentukan sikap penegak hukum yang menjalankan fungsi secara profesional, keadilan, dan dapat menjamin atas hak-hak masyarakat sekaligus mewujudkan ketentraman serta kejelasan hukum sebagaimana dalam konstitusi di amanatkan.¹

Negara Republik Indonesia kini berada dalam era reformasi, suatu fase yang menuntut transformasi menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Penguatan supremasi hukum yang menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya lembaga dan aparat penegak hukum, merupakan fokus utama dalam agenda reformasi. Namun, dalam praktiknya, proses penyelesaian perkara hukum oleh aparat sering kali menghadapi kendala dan menyisakan permasalahan yang tidak terselesaikan secara tuntas. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kejahatan serta meluasnya perilaku menyimpang dalam masyarakat.

Penerapan hukum serta dalam praktiknya di Indonesia masih terdapat celah. Saat ini negara Indonesia dalam sistem hukum, terdapat beberapa kekurangan, bukan hal dalam penerapan hukum atau isi pada aturannya akan tetapi cita-cita warga negara untuk dapat perlindungan serta jaminan hukum masih belum sesuai harapan masyarakat. Penerapan hukum secara praktik belum optimal selaras dengan keadilan semestinya.

Penegakan hukum dalam menjalankan peran sebagai lembaga dalam menjunjung keadilan. Namun, masih terdapat aparat yang dalam praktiknya kurang memberikan perlindungan maksimal terhadap hak warga, dan dalam hal seseorang sebagai tersangka ataupun terdakwa. Pada tahap polisi menacari barang bukti atau alat bukti pada tersangka sering kali mengabaikan prinsip

¹ Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta UI Press.

Ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan ke pengadilan wajib diperlakukan sebagai orang yang belum bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan berkekuatan hukum tetap”²

Sebelum memulai penyidikan, petugas kepolisian melakukan penyelidikan. Sebenarnya, tujuan penyelidikan ini adalah untuk menentukan apakah penyelidikan lebih lanjut diperlukan atau tidak. Karena tugasnya untuk menyaring sistem peradilan pidana ini, polisi diposisikan sebagai "jaga pintu dalam proses”.³

Proses penyidikan di tingkat kepolisian, Setiap penyidik harus mengikuti semua pedoman yang telah diatur, hal ini untuk melindungi hak asasi pelaku dalam tahap penyidikan dengan menetapkan bahwa pelaku tersebut tidak dapat semerta-merta di nyatakan bersalah walaupun putusan pengadilan belum ditetapkan yang berkekuatan hukum.

Sesuai dengan prinsip asas praduga tak bersalah bahwa bagi tiap pelaku dianggap dalam tindakan pelanggaran serta belum ditetapkan sebagai terpidana atau ada putusan berkekuatan hukum oleh pengadilan maka seseorang tersebut masih memiliki hak-hak sebagai masyarakat. Untuk itu, seseorang tersebut memiliki hak untuk dapat diserahkan kepada pihak yang bersangkutan yang miempunyai wewenang itu diperiksa lebih lanjut.⁴

Dalam praktiknya, Penerapan asas praduga tak bersalah sering menjadi perhatian, khususnya dalam kasus-kasus pelaku tindak pidana pencurian. Pencurian sendiri termasuk dalam kategori tindak pidana umum yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak kepemilikan atas barang atau benda milik orang lain. Tindakan tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi pelaku yang kurang memadai atau rendahnya tingkat penghasilan.

Untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa, pelaksanaan proses hukum harus

² Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

³ Faal, M. (1991). *Penyaringan perkara pidana oleh polisi: diskresi kepolisian*. Pradnya Paramita.

⁴ Abdul Djamil. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grfindo Persada.

berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum dituntut untuk mengikuti prosedur hukum sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam KUHAP. Asas-asas ini berkaitan erat dengan penghargaan terhadap martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, asas praduga tak bersalah menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

METODE

Metode Penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris, Metode Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yaitu Polrestabes Kota Makassar, Dipilihnya lokasi penelitian ini karena daerah tersebut representatif untuk penelitian penulis. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yaitu: data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti.; data sekunder seperti diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi, buku-buku literatur, jurnal, perundang-undangan, artikel hukum, karangan ilmiah, dokumen/arsip tertulis, data-data, dan bacaan-bacaan. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian Pada Polrestabes Makassar

Di wilayah hukum Polrestabes Makassar, tindak pidana pencurian masih menjadi salah satu kasus yang dominan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Faktor-faktor seperti kesulitan ekonomi, lemahnya pengawasan lingkungan, dan pengaruh lingkungan sosial turut menjadi penyebab terjadinya pencurian. Di sisi lain, peningkatan kinerja aparat kepolisian dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan telah berkontribusi pada upaya pencegahan kejahatan tersebut.

Dalam penerapan Asas Praduga Tak Bersalah berarti kita membicarakan bagaimana penerapan asas tersebut dalam proses pemeriksaan, baik proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan yang dilakukan penyidik, penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum serta hingga proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim, dimanah pada putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Makna yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya.⁵

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya dari pejabat negara;
2. Bahwa Pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia);dan
4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Marwan Efendi yang menyatakan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan teks indah yang tertulis dalam undang-undang, melainkan tercermin dari tindakan nyata para penegak hukum. Dengan kata lain, keindahan suatu norma hukum terwujud melalui pelaksanaannya secara konsisten oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi tersebut mencakup pelaksanaan proses hukum secara menyeluruh, mulai dari tahap penyidikan,

penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, termasuk pula pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam Pasal 50 hingga Pasal 68.

⁵ Komariah E. Sapardjaja, (1987), Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Jakarta; Persaja, hlm. 284.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana Indonesia memuat secara tegas pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam Pasal 2. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau dituntut atas suatu tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah menurut hukum dan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini secara substansial memperkuat jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk memperoleh proses hukum yang adil (*fair trial*), sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan pembuktian dalam penerapan asas praduga tak bersalah melibatkan:

1. Bukti yang diajukan oleh penuntut umum harus bersifat sah (legal) dan meyakinkan, seperti:
 - a. Dokumen resmi dan saksi yang kredibel.
 - b. Bukti materiil seperti barang bukti yang mendukung keterlibatan terdakwa.
 - c. Keterangan ahli jika dibutuhkan yang relevan dengan kasus.
2. Bukti harus diperoleh secara prosedural tanpa pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa, sehingga bukti yang didapat dengan cara melanggar hukum dapat ditolak oleh pengadilan.
3. Selama proses pembuktian berlangsung, terdakwa dianggap tidak bersalah dan diperlakukan dengan perlindungan hak-hak yang memadai, termasuk kesempatan membela diri dan pendampingan hukum.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Hamka, diperoleh keterangan bahwa “pada prinsipnya dalam melakukan tindakan penanganan pada semua perkara pidana, termasuk perkara tindak pidana pencurian yang terjadi dalam wilayah hukumnya harus berdasarkan ketentuan pelaksanaan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang mengaturnya”.

Dalam konteks penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (APTb) pada tahap penyidikan kasus pencurian, hasil wawancara peneliti dengan salah satu penyidik di Satreskrim Polrestabes Makassar, Aipda Rijal, menyatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan

⁵ Raharja, I. G. N. P., & Wedha, Y. Y. (2025). PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI TABANAN. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 5(1), 107-124.

prinsip APTB dalam setiap proses menangani. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimulai sejak tahap penyelidikan. Penetapan seseorang sebagai tersangka pun dilakukan berdasarkan adanya dugaan kuat yang disertai dengan bukti permulaan yang cukup.

Lebih lanjut Bapak Aipda Rijal menambahkan, yang dimaksud dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penanganan tindak pidana pencurian berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada, yang mengarah kepada adanya bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan kesalahan sebagaimana yang disangkakan kepadanya, dan hal inilah yang selalu dilakukannya dalam setiap melakukan penyidikan.

Bapak Akp Hamka juga berpendapat bahwa, penerapan asas praduga tak bersalah di wilayah hukum Polrestabes Makassar, khususnya di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), telah dilaksanakan secara konsisten. Apabila terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat, maka laporan tersebut dipandang sebagai informasi sepihak yang masih memerlukan proses klarifikasi dan verifikasi melalui tahapan penyelidikan dan/atau penyidikan. Jika dari hasil penanganan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka Sat Reskrim Polrestabes Makassar dapat melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa, seperti penyitaan dan penangkapan. Dalam hal dilakukan penangkapan, maka dalam waktu 1 x 24 jam yang bersangkutan harus segera diperiksa. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan cukup bukti atas dugaan perbuatan pidana dan memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka proses hukum akan dilanjutkan. Namun, apabila dalam waktu 1 x 24 jam tersebut tidak ditemukan cukup bukti, maka orang yang ditangkap wajib segera dibebaskan dari penahanan. Bagi setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan diperiksa sebagai tersangka, wajib dijelaskan perkara yang disangkakan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang bersangkutan.⁶

Lebih lanjut Bapak Akp Hamka menambahkan, “Dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penanganan tidaklah selalu berarti mengikuti aturan-aturan yang ada dan menganggap bahwa tersangka tidak bersalah, akan tetapi para pihak kepolisian dapat melakukan diskresi jika terdapat beberapa petunjuk dan dapat diyakini adanya bahwa si tersangka tersebut benar-benar telah melakukan kesalahan yang disangkakan

⁶ Akp Hamka, *Kanit idik v Jatanras Polrestabes Makassar Wawancara 2 Juli 2025*

kepadanya, tanpa harus menunggu sampai ada keputusan tetap dari pengadilan. Namun demikian, hak-hak tersangka harus tetap dijaga oleh kepolisian sebagaimana halnya dengan orang yang belum atau tidak melakukan kesalahan sama sekali”

Menurut Bapak Aipda Rijal mengatakan, Pertama, kami terima laporan dari korban. Setelah itu, kami lakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti. Kalau bukti permulaan cukup, barulah kami naikkan ke penyidikan dan tetapkan tersangka.

Proses penangkapan dilakukan sesuai SOP, dan tersangka tetap diberi haknya, seperti pendampingan pengacara dan tidak boleh dipaksa mengaku. Kami tidak langsung menganggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Jadi prinsip praduga tak bersalah tetap kami pegang dari awal sampai pelimpahan ke kejaksaan.”⁷

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penanganan tindak pidana, khususnya pada kasus pencurian di wilayah Hukum Polrestabes Makassar masih sangat bervariasi. Hal ini sangat tergantung dan dipengaruhi oleh masing-masing pemahaman penyidik tentang makna dari “asas praduga tak bersalah” tersebut.

Dalam penerapannya bahwa dimuatnya sejumlah hak tersangka dalam KUHAP masih belum dapat terjamin bagi tersangka/terdakwa. Berdasarkan pengakuan dari salah seorang tahanan dari beberapa banyak tahanan pada kasus pencurian yang bernama Syamsul Bahri (23 tahun), mengatakan bahwa:

“Saat proses pemeriksaan berlangsung saya dicambuk, di pukul pada bagian seluruh tubuh sampai pingsan dengan menggunakan ganggang senjata. Selain itu juga, saya diberi ancaman oleh polisi”⁸

Tentu bukan hanya Bapak Syamsul Bahri menjadi korban oleh oknum aparat kepolisian, suatu kasus pelanggaran oleh oknum aparat Polrestabes Makassar yang paling menonjol adalah Tiga oknum anggota unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polrestabes Makassar diduga terlibat dalam tindakan kekerasan fisik yang berujung pada penganiayaan terhadap seorang residivis kasus pencurian bernama Maman (47 tahun), saat proses penangkapan

⁷ Aipda Rijal Penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar Wawancara Pada Tanggal 2 Juli 2025.

⁸ Syamsul Bahri Mantan Narapidana Pencurian, Wawancara Pada 2 Juli 2025.

yang berlangsung di Jalan Tinumbu, Kecamatan Tallo, pada tanggal 23 Agustus 2023.⁹ Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, tindakan represif tersebut dilakukan atas dasar klaim bahwa korban melakukan perlawanan aktif, bahkan sampai melukai aparat saat akan diamankan. Oleh karena itu, tindakan penegakan hukum dilakukan secara paksa dan keras demi menjamin keselamatan petugas di lapangan.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana dan prinsip hak asasi manusia, tindakan kekerasan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka terlebih yang belum melalui proses pembuktian di pengadilan berpotensi melanggar asas *praduga tak bersalah (presumption of innocence)* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan dalam KUHAP. Penegakan hukum idealnya harus mengedepankan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas, sehingga tindakan kekerasan yang tidak proporsional, meskipun dilakukan dalam konteks perlawanan, tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan terukur. Dugaan penganiayaan oleh oknum anggota kepolisian ini mengindikasikan adanya pelanggaran etik dan potensi tindak pidana yang harus ditindaklanjuti secara transparan melalui mekanisme peradilan pidana dan pemeriksaan internal oleh Divisi Propam.¹⁰

B. Faktor-Faktor yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pencurian pada polrestabes Makassar

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestabes Makassar ada beberapa faktor yang dapat menghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penanganan pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, penulis membagi dua faktor internal dan eksternal yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud disini adalah faktor yang berasal dari dalam dari individu atau suatu sistem yang dapat mempengaruhi perilaku perkembangan dari individu atau sistem tersebut. *Wheelen* dan *Hunger*, Lingkungan internal terdiri dari struktur (*structure*), budaya (*culture*), sumber daya (*resources*). Lingkungan

⁹ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6894324/dalih-polrestabes-makassar-soal-3-polisi-diduga-aniaya-pencuri-hingga-tewas>. Diakses pada 1 juli 2025.

¹⁰ Kaligis, O.C, 2006. Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Alumni, Bandung

internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang ada dalam perusahaan atau organisasi atau Lembaga. Faktor-faktor internal ini berasal dari dalam institusi Polrestabes Makassar itu sendiri, termasuk dari sisi personel, sistem, dan budaya kerja.

a. Minimnya Pemahaman Para Aparat

Sejumlah oknum penyidik di Polrestabes Makassar diduga belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai fundamental dari asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari prinsip *due process of law*. Kurangnya pemahaman ini tercermin dari masih adanya praktik-praktik penyidikan yang menyimpang, di mana tersangka kerap diperlakukan seolah-olah telah bersalah sejak awal proses pemeriksaan. Sesuai dengan kasus yang dialami oleh Syamsul Bahri yang menjadi korban oleh oknum penyidik. Hal ini ditunjukkan melalui sikap dan perlakuan aparat yang cenderung menekan, mengintimidasi, bahkan menyudutkan tersangka secara psikologis maupun fisik, padahal alat bukti yang menguatkan sangkaan terhadap yang bersangkutan belum sepenuhnya terkumpul secara sah dan cukup. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai asas keadilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta merusak legitimasi institusi penegak hukum di mata publik.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh pada saat penelitian di Satreskrim Polrestabes Makassar terungkap bahwa personel yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi hanya ada beberapa saja, sehingga membutuhkan lagi tambahan polisi yang berkualitas untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas kepolisian yang mengalami hambatan karena masih sedikitnya Aparat yang benar-benar memiliki profesionalitas kerja yang baik, hal ini mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang ada di masyarakat.¹¹

b. Budaya Kekerasan Dalam Proses Penyidikan

Budaya kekerasan dalam proses penyidikan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang masih terjadi di lingkungan penegakan hukum, termasuk di wilayah Polrestabes Makassar. Dalam sejumlah laporan, baik dari

¹¹ Akp Hamka, Kanit idik v Jatanras Polrestabes Makassar Wawancara 2 Juli 2025

lembaga pengawas eksternal maupun pengaduan langsung masyarakat, ditemukan indikasi kuat terjadinya tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis, yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka selama proses pemeriksaan. Hal ini serupa yang dialami oleh Maman (47) yang mengaku pihak kepolisian terlibat kekerasan. Praktik ini tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga mengindikasikan masih mengakarnya pola pikir represif yang memandang kekerasan sebagai instrumen sah dalam memperoleh pengakuan atau mempercepat pengungkapan perkara. Budaya semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta melanggar asas praduga tak bersalah dan keadilan prosedural. Keberlangsungan praktik tersebut mencerminkan perlunya reformasi kelembagaan dan pergeseran paradigma penegakan hukum menuju pendekatan yang lebih humanis, akuntabel, dan berbasis bukti (*evidence-based investigation*).

c. Kurangnya Sarana Dan Prasarana

Menurut Bapak Akp Hamka, dukungan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan tugas penanganan tindak pidana khususnya Pencurian pada fungsi reserse kriminal saat ini masih belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini tercermin dari beberapa kendala nyata di lapangan, seperti:¹²

- 1) Sejumlah kebutuhan dasar seperti komputer, printer, meja, kursi, serta alat tulis kantor (ATK) sebagian besar masih disediakan secara swadaya oleh penyidik maupun penyidik pembantu, mengingat keterbatasan alokasi anggaran dari dinas terkait.
- 2) Fasilitas untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) belum tersedia secara lengkap dan belum sepenuhnya didukung melalui anggaran operasional, sehingga kebutuhan seperti film kamera, cakram digital (CD), dan kartu sidik jari untuk keperluan identifikasi masih harus dipenuhi secara mandiri oleh satuan fungsi reserse di tingkat Polrestabes Makassar.
- 3) Tidak tersedianya ruang penyimpanan berkas perkara dan barang bukti yang memadai sering kali menimbulkan masalah-masalah klasik yang selalu

¹² Akp Hamka, *Kanit idik v Jatanras Polrestabes Makassar Wawancara 2 Juli 2025*

berulang seperti hilangnya berkas perkara atau barang bukti yang berkurang atau berubah bentuk.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri atas unsur-unsur yang berada di luar individu, organisasi atau sistem tertentu yang juga bisa mempengaruhi perilaku, kinerja atau perkembangan dari individu, sistem atau organisasi tersebut. Faktor eksternal berasal dari tekanan atau pengaruh di luar kepolisian, namun berdampak langsung terhadap kinerja.

a. Kurangnya Pemahaman Hukum Masyarakat

Menurut Bapak Akp Hamka bahwa, “masyarakat cenderung memiliki persepsi yang terbentuk secara kolektif bahwa pelaku pencurian adalah individu yang sudah pasti bersalah tanpa mempertimbangkan proses pembuktian hukum yang seharusnya mendahului penetapan kesalahan”¹³

Pandangan semacam ini mencerminkan rendahnya pemahaman publik terhadap prinsip asas praduga tak bersalah, yang seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tekanan sosial ini pada akhirnya menciptakan beban moral dan psikologis tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, untuk segera menetapkan dan mengumumkan tersangka demi memenuhi ekspektasi publik. Dalam kondisi seperti itu, tidak jarang aparat tergoda untuk mengesampingkan prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil dan bertindak secara tergesa-gesa, bahkan represif. Akibatnya, tindakan penyidikan yang dilakukan menjadi tidak lagi objektif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia tersangka, serta merusak integritas sistem peradilan pidana itu sendiri.

b. Tekanan dari Opini Publik dan Media Lokal

Di Kota Makassar, terutama dalam kasus pencurian yang menimbulkan keresahan warga, sering muncul desakan masyarakat dan pemberitaan media yang menuntut aparat bertindak cepat. Menurut Bapak Aipda Rijal “sering kali kami

¹³ Akp Hamka, Kanit idik v Jatanras Polrestabes Makassar Wawancara 2 Juli 2025

menemukan suatu desakan dari media dan warga untuk lebih cepat menetapkan tersangka tentunya hal ini dapat mengganggu kinerja kami sebagai penyidik”¹⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penanganan tindak pidana pencurian oleh Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar masih belum terlaksana secara optimal dan konsisten sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia. Masih banyak pelanggaran terhadap penerapan asas ini seperti, berupa tindakan represif terhadap tersangka, serta praktik intimidasi dan kekerasan fisik maupun psikis yang dialami oleh beberapa tersangka dalam proses pemeriksaan. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses penanganan tindak pidana pencurian oleh Kepolisian Resort Kota Kota Besar Makassar adalah , Faktor internal dan eksternal. Internal minimnya pemahaman aparat, budaya kekerasan dalam proses penanganan serta kurangnya saran dan prasarana. Eksternal yaitu, kurangnya pemahaman hukum masyarakat, dan tekanan dari opini publik dan media lokal. pihak kepolisian dalam hal ini kepolisian Polrestabes Makassar dalam proses penanganan wajib melaksanakan tugasnya secara profesional, objektif, dan berlandaskan pada norma hukum yang menghormati martabat serta hak-hak asasi tersangka. Mengabaikan asas ini tidak hanya berpotensi mencederai prinsip keadilan, tetapi juga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kesalahan prosedural, hingga pembatalan proses hukum secara keseluruhan. Maka, integritas proses penanganan sangat bergantung pada konsistensi penerapan asas praduga tak bersalah sebagai bentuk perlindungan hukum dan cerminan negara hukum yang demokratis.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada ayahanda Drs. M Darwis dan Ibunda Sri Yuwati yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, serta kepada sahabat-sahabat yang turut terlibat dalam membantu penulis, memberikan semangat dan motivasi demi kelancaran dalam menggapai cita-cita. Serta terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum yang telah memberikan fasilitas terbaik dalam mendukung penyelesaian jurnal penelitian ini.

¹⁴ Aipda Rijal Penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar Wawancara pada 2 Juli 2025.

REFERENSI

- [1] AL-QUR'AN dan Terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- [2] Aipda Rijal Penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar Wawancara pada 2 Juli 2025.
- [3] Akp Hamka, Kanit idik v Jatanras Polrestabes Makassar Wawancara 2 Juli 2025.
- [4] <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6894324/dalih-polrestabes-makassar-soal-3-polisi-diduga-aniaya-pencuri-hingga-tewas>. Diakses pada 1 juli 2025.
- [5] Kaligis, O.C, 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung.
- [6] Syamsul Bahri Mantan Narapidana Pencurian, Wawancara Pada 2 Juli 2025.
- [7] Raharja, I. G. N. P., & Wedha, Y. Y. (2025). PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI TABANAN. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 5(1), 107-124.
- [8] Komariah E. Sapardjaja, (1987), *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta; Persaja, hlm. 284.
- [9] Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- [10] Ikhsan, F. A., Razak, A., & Basyuni, F. (2021). *Penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan (Studi Putusan PN Makassar No.1913/Pid.B/2020)*. Qawaninjih: *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 7(2), 179–193
- [11] Faal, M. (1991). *Penyaringan perkara pidana oleh polisi: diskresi kepolisian*. Pradnya Paramita.
- [12] Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta UI Press.